

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (Studi pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo)

Oleh

Farasandya Amalia Hapsari *)

lie_yaamalia@yahoo.co

Abstrak: Sertifikasi guru menjadi landasan menjamin keberadaan guru yang profesional dengan kemampuan kerja yang maksimal. Dan ini merupakan tujuan nasional bagi pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan sertifikasi guru diharapkan mampu menjadi solusi bagi kemajuan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru yang selama ini menjalani profesi guru adalah profesi pengabdian. Dengan diharapkan dengan adanya sertifikasi maka kesejahteraan guru bisa terwujud. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil pelaksanaan sertifikasi guru sekolah menengah pertama yang ada di kota Probolinggo tahun 2016/ 2017. Metode yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus di Kota Probolinggo. Fokus penelitian ini adalah kebijakan sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi organisasi pelaksana. Data yang digunakan merupakan data verbal dari informasi responden tentang kebijakan sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama di Kota Probolinggo. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, Focus Group Discussion/ FGD, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan *Interactive Model Analysis* dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan simpulan.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Sertifikasi Guru*

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia menjadi salah satu masalah yang sangat substansial. Di era globalisasi saat ini, Indonesia harus mampu meningkatkan pendidikan, sehingga tidak kalah bersaing dengan negara lain. Negara kita harus mencetak orang-orang yang berjiwa mandiri dan mampu berkompetisi di tingkat dunia. Saat ini, Indonesia membutuhkan orang-orang yang dapat berfikir secara efektif, efisien dan juga produktif. Hal tersebut dapat diwujudkan jika kita mempunyai tenaga pendidik yang handal dan mampu mencetak generasi bangsa yang pintar dan bermoral.

Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalitas guru adalah melalui program

sertifikasi. Program sertifikasi guru adalah upaya pemerintah untuk mengidentifikasi guru-guru yang berkualitas dan berkompetensi. Guru profesional yang dinyatakan dalam bentuk pemberian sertifikat pendidik, merupakan dasar untuk memberikan tunjangan profesi. Guru yang memperoleh tunjangan profesi dikategorikan sebagai guru profesional yang wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Banyak fenomena menarik dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru. Hal ini disebabkan kebijakan sertifikasi guru yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk

memberdayakan profesi guru melalui kualifikasi akademik dan kompetensi, ternyata memacu pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan sertifikasi massal. Kalau bersifat massal, maka dampaknya tentu saja berimbas pada kualitas, dan akhirnya sertifikasi tersebut tidak lebih dari formalitas belaka dan tidak menyentuh substansi. Bahkan bukan tidak mungkin, kebijakan sertifikasi juga memberi peluang lebar-lebar bagi terciptanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi tersebut berefek lanjut pada munculnya konflik horizontal dan vertikal dalam profesi guru.

Guru yang sudah memenuhi persyaratan akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Padahal, beban mengajar yang dilakukan oleh guru adalah sama. Akibatnya, konflik horizontal-internal terjadi. Guru yang belum bersertifikat menjadi tidak bersemangat, motivasi mengajar lemah, dan kualitas pendidikan pun menurun. Adapun konflik vertikal akan terjadi bila terdapat guru yang memegang jabatan tertentu tidak lulus uji sertifikasi. Misalnya bila ini terjadi pada guru-guru yang menempati posisi-posisi tertentu dalam struktur, seperti kepala sekolah, pengawas, ataupun penilik. Kebijakan sertifikasi guru tidak hanya diberlakukan kepada guru, tetapi juga kepada semua tenaga kependidikan. Apa jadinya, bila ternyata guru-guru yang menduduki jabatan tersebut justru tidak lulus uji sertifikasi. Dipastikan, akan terjadi pembangkangan dari guru-guru yang menjadi bawahannya.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan sertifikasi guru ini menggunakan media pedoman wawancara, pedoman diskusi, dan alat perekam. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik penelitian yang diantaranya observasi, pemilihan informan, wawancara, diskusi kelompok, dan dokumentasi dimana penelitian ini memiliki tujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi dan faktor-faktor kebijakan

sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama Setia Kota Probolinggo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menceritakan tentang penerpan kebijakan dan faktor-faktor kebijakan sertifikasi guru di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Setia Kota Probolinggo. Penelitian ini dilakukan di SMP SETIA Probolinggo. Peneliti mengambil 13 Subjek yang diantaranya 4 dari dinas pendidikan kota probolinggo dan 9 dari guru SMP Setia Probolinggo. Peneliti juga mengambil 3 informan dimana 1 seorang tukang kebun dan 2 orang bekerja menjadi satpam di SMP Setia Probolinggo. Data tersebut di tunjukkan seperti data pada tabel berikut:

Tabel: 1 Subyek dan Informasi Penelitian

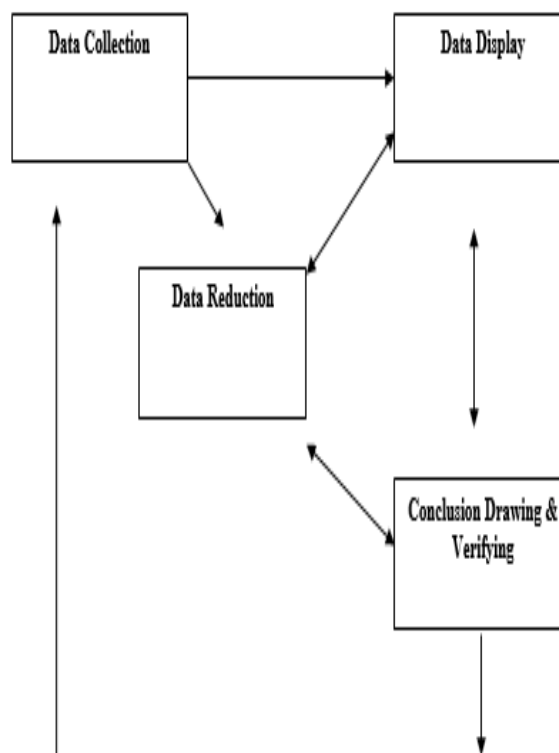
No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo	Subyek
2.	ADI SUHERMANTO, S.Pd., MMPd	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Probolinggo	Subyek
3.	ABD. JALAL, S.Pd	Staf Dinas Pendidikan Kota Probolinggo	Subyek
4.	SUYONO	Staf Dinas Pendidikan Kota Probolinggo	Subyek
5.	Fendik Hermawan, S.T	Guru SMP Setia	Subyek
6.	Evi Udaranting, S.Pd	Guru SMP Setia	Subyek
7.	Wiwini Ratnawiduri, S.E	Guru SMP Setia	Subyek
8.	Rosyada, S. S	Guru SMP Setia	Subyek
9.	Suhartatok, S.Pd	Guru SMP Setia	Subyek
10.	Suharnanik, S.Pd	Guru SMP Setia	Subyek
11.	Nila Yuniara, S.Pd	Guru SMP Setia	Subyek
12.	Moh. Khoirul Anam, M.Pd	Guru SMP Setia	Subyek
13.	Yuyun Dewi Rahayu, S.Pd	Guru SMP Setia	Subyek
14.	Su'id	Satpam	Informan
15.	Sujono	Satpam	Informan
16.	Sapri	Satpam	Informan

Sumber: Peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti memperoleh data penelitian dengan cara melakukan observasi, menentukan informan, mengadakan wawancara, mengadakan diskusi kelompok, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul peneliti kemudian menganalisis hasil dari observasi, hasil wawancara, dan hasil diskusi. Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian. Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan seperti yang di tunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 1: Pengumpulan data dengan Analisis data



Sumber: Miles dan Huberman (1984)

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor masa kerja sangat berpengaruh terhadap kelulusan sertifikasi. Pada tahun 2009 dan 2010, guru SMP yang lulus sertifikasi memiliki masa kerja di atas 20 tahun. Ini menunjukkan penghargaan pemerintah kepada guru yang sudah mengabdikan sekian lama mendapat prioritas mendapatkan tunjangan profesi. Kondisi guru SMP di Kota Probolinggo menarik dan layak untuk diteliti karena jumlah guru SMP yang sudah berijazah S-1 lebih dari **30%** (sekitar 1.105 guru) dari keseluruhan jumlah guru berijazah S-1 di Kota Probolinggo (lihat tabel I.2). Jumlah 30% ini sangat jauh dibandingkan dengan prosentase nasional jumlah guru SMP berkualifikasi S-1 dari keseluruhan guru berijazah S-1 Indonesia yaitu **13,6%** (sekitar 130.898 guru).

Hal menarik lain adalah kuota guru SMP di Kota Probolinggo yang mendapat sertifikat guru juga cukup besar dibandingkan guru

SMP dan SMA. Pada tahun 2006 Kota Probolinggo memberikan kuota kepada 101 untuk mengikuti sertifikasi. Jumlah itu terdiri dari guru SD/MI 73 orang dan 28 orang SMP/MTs yang memiliki ijazah strata 1 (S-1). Sementara pada tahun 2007 guru SMP di Kota Probolinggo mendapat kuota separuh lebih dari total kuota 654 guru yaitu 337 orang yang terdiri dari 255 PNS dan 82 Non PNS.

Tabel 4
Rekapitulasi Cuota Kuota dan Jumlah Guru yang Bersertifikasi
di Kota Probolinggo

Tingkat Pendidikan	SD/MI	SLB	SLTP	SLTA	SLP	SLM	SLK	Jumlah
2006	73	28	0	0	0	0	0	101
2007	101	0	0	0	0	0	0	101
2008	101	0	0	0	0	0	0	101
2009	101	0	0	0	0	0	0	101
2010	101	0	0	0	0	0	0	101
2011	101	0	0	0	0	0	0	101
2012	101	0	0	0	0	0	0	101
2013	101	0	0	0	0	0	0	101
2014	101	0	0	0	0	0	0	101
2015	101	0	0	0	0	0	0	101
2016	101	0	0	0	0	0	0	101
2017	101	0	0	0	0	0	0	101
2018	101	0	0	0	0	0	0	101
2019	101	0	0	0	0	0	0	101
2020	101	0	0	0	0	0	0	101
2021	101	0	0	0	0	0	0	101
2022	101	0	0	0	0	0	0	101
2023	101	0	0	0	0	0	0	101
2024	101	0	0	0	0	0	0	101
2025	101	0	0	0	0	0	0	101
2026	101	0	0	0	0	0	0	101
2027	101	0	0	0	0	0	0	101
2028	101	0	0	0	0	0	0	101
2029	101	0	0	0	0	0	0	101
2030	101	0	0	0	0	0	0	101

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Probolinggo

Pemberian kuota yang lebih besar kepada guru SMP ini karena jumlah guru SMP di Kota Probolinggo yang berusia diatas 51 tahun jumlahnya besar yaitu 1186 orang terdiri dari 667 orang guru laki-laki dan 58 orang guru perempuan. Bahkan yang memasuki usia pensiun juga masih banyak yaitu 60 orang guru laki-laki dan 36 guru perempuan (lihat tabel 4.3). Hal itu sesuai dengan Pedoman Penetapan Peserta dan Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang dikeluarkan oleh Ditjen PMPT bahwa penentuan guru calon peserta sertifikasi dalam jabatan menggunakan sistem ranking antara lain berdasarkan faktor usia, bukan berdasarkan seleksi melalui tes.

Tabel 5
Rekapitulasi Cuota Kuota dan Jumlah Guru yang Bersertifikasi
di Kota Probolinggo

Tingkat Pendidikan	SD/MI	SLB	SLTP	SLTA	SLP	SLM	SLK	Jumlah
2006	73	28	0	0	0	0	0	101
2007	101	0	0	0	0	0	0	101
2008	101	0	0	0	0	0	0	101
2009	101	0	0	0	0	0	0	101
2010	101	0	0	0	0	0	0	101
2011	101	0	0	0	0	0	0	101
2012	101	0	0	0	0	0	0	101
2013	101	0	0	0	0	0	0	101
2014	101	0	0	0	0	0	0	101
2015	101	0	0	0	0	0	0	101
2016	101	0	0	0	0	0	0	101
2017	101	0	0	0	0	0	0	101
2018	101	0	0	0	0	0	0	101
2019	101	0	0	0	0	0	0	101
2020	101	0	0	0	0	0	0	101
2021	101	0	0	0	0	0	0	101
2022	101	0	0	0	0	0	0	101
2023	101	0	0	0	0	0	0	101
2024	101	0	0	0	0	0	0	101
2025	101	0	0	0	0	0	0	101
2026	101	0	0	0	0	0	0	101
2027	101	0	0	0	0	0	0	101
2028	101	0	0	0	0	0	0	101
2029	101	0	0	0	0	0	0	101
2030	101	0	0	0	0	0	0	101

Kebijakan sertifikasi guru adalah suatu pilihan tindakan pemerintah dalam rangka memberdayakan profesi guru dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui uji kualitas akademik dan kompetensi pendidik dalam rangka pemberian penghargaan kepada guru. Penghargaan tersebut bersifat materi berupa pemberian tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok. Kebijakan tersebut selanjutnya harus diimplementasikan karena implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka.

Disamping itu, hal lain yang penting juga dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh Pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu. Begitu juga dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru yang merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai institusi pemerintah yaitu Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, LPTK, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kota/Kota. Kebijakan sertifikasi guru terutama bagi guru Sekolah Menengah Pertama yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy maker* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya.

Keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama di Kota Probolinggo ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Implementasi kebijakan sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama di Kota Probolinggo secara umum berjalan baik. Dalam pandangan beberapa ahli maka implementasi kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama di Kota Probolinggo adalah : 1) komunikasi; 2) sumberdaya; 3) disposisi; dan 4) struktur birokrasi, dan 5) kondisi sosial ekonomi.

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran.
2. Sumberdaya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekeurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen.
3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen dan kejujuran. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti

apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur birokrasi. Struktur organisasi yang mengimplementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau *SOP*). SOP menjadi pedoman bagi implementor di dalam bertindak. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
5. Lingkungan sosial ekonomi. Faktor ini mencakup kondisi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan di suatu daerah tertentu tetapi gagal diimplementasikan di daerah lain karena tergantung sejauh mana kelompok – kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Selain itu juga tergantung pada kondisi ekonomi masyarakat, apakah mendukung kebijakan dan lain sebagainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di SMP Setia Kota Probolinggo masih belum terlaksana secara efektif. Masih ada guru yang belum benar-benar mengerti prosedur dan mekanisme sertifikasi guru yang dikarenakan guru belum mempunyai berkas – berkas atau folio yang berhubungan dengan sertifikasi. Pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru masih belum optimal.

Berdasarkan keberperanan empat unsur penentu keberhasilan implementasi kebijakan, setiap unsur dapat dipenuhi walaupun belum sempurna. Masih banyak kekurangan dalam unsur komunikasi dan struktur birokrasi. Ketidaktepatan dari keempat unsur menghambat proses implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kota Probolinggo.

Disarankan agar implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kota Probolinggo dapat terlaksana secara efektif, setiap pihak terutama guru harus tahu dan mengerti program sertifikasi: dasar hukum, tujuan, manfaat, prosedur, mekanisme dan alur sertifikasi. Inkonsistensi aturan sebisa mungkin diminimalisir agar tidak lagi membingungkan. Seleksi calon peserta sertifikasi harus lebih diperketat, sehingga guru yang diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan guru adalah guru yang kompeten dan siap diuji secara pedagogik dan kepribadian sebagai guru.

Sementara untuk mengatasi kendala dalam hal penyampaian pesan kepada sasaran program (para guru), seharusnya diadakan komunikasi langsung tanpa melalui banyak jalur yang justru akan mendistorsi makna pesan yang dimaksud. Dialog interaktif maupun diskusi adalah alternatif solusi yang perlu dipertimbangkan. Ketidaktepatan pesan dapat ditanggulangi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang menguasai materi tentang sertifikasi guru. Dan untuk SOP yang selalu berganti, pihak daerah (Dinas Pendidikan) seharusnya dapat menyampaikan keluhan dan aspirasi guru yang kebingungan akan aturan kepada Dinas Propinsi dan Pusat karena lazimnya yang membuat SOP adalah pembuat kebijakan agar kebijakan tersebut dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, Abdulkahar dan T.Yuwono, 2002, *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*, Universitas Diponegoro,
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Danim, Sudarwan, 2000, *Pengantar Studi penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta. Pustaka Setia, Bandung.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Dunn, William N , 2003 *Pengantar Analisa Kebijakan Publik II*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ekosusilo, Madyo, 2003, *Supervisi Pengajaran dalam Latar Belakang Budaya Jawa : Studi Kasus Pembinaan Guru SD di Kraton Surakarta*. Universitas Bentara Press, Surakarta.
- Faisal, Sanapijah, 1990, *Penelitian Kualitatif*, YA3, Malang.
- Howlett, Michael and M. Ramesh, 1995, *Studying Public Policy :Policy Cycle and Policy Subsystem*, Oxford University Press, Canada.
- Imron, Ali, 2002, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Keban, Yeremias, T, 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, Penerbit Gava media, Yogyakarta.
- Kismartini, dkk, 2005, *Analisis Kebijakan Publik (Buku Materi Pokok UT)*, Penerbit UT, Depdiknas, Jakarta.
- Lincoln, Yvona S. dan Egon G. Guba, 1985, *Naturalistic Inquiry*, Sage Publication, Beverly Hills.
- Moleong, Lexy J, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyasa, 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Munandir, (trans), Robert C Bogdan dan Knop Biklen, 1992, *Riset Kualitatif Untuk Pendidikan. Pengantar Teori dan Metode*,

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Muslih, Masnur, 2007, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalitas Pendidik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nawawi, Hadari dan Martina, 1994, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Naihasy, Syahrin, 2006, *Kebijakan Publik, Menggapai Masyarakat Madani*, PT Mida Pustaka, Yogyakarta.
- Rohedi, Tjetjep, (trans), Matthew B Miles and AM Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi, 1989, *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Supratno, Haris, *Workshop Strategi Meningkatkan Mutu Guru, Bogor, Tanggal 8 Desember 2007*)
- Sonhaji, K.H, 1994, *Misi, Strategi dan Kendala Penelitian Kualitatif*, Pusat Penelitian IKIP Malang, Malang.
- Trianto dan Titik Triwulan, 2007, *Sertifikasi dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 1997, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Surat Kabar
- Sugiharto, Manajemen Keikhlasan Abaikan Administrasi, Suara Merdeka, 26 Februari 2008
- *) Farasandya Amalia Hapsari adalah mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Malang.